



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NIAS SELATAN

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS P2KBP3A

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan karuniaNya serta Ridhonya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat kami selesaikan sebagaimana semestinya.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. Penetapan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja ini didasarkan pada identifikasi faktor-faktor keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 7 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Oleh karena itu, segala usul dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak demi kemajuan Kabupaten Nias Selatan pada umumnya dan yang kita cintai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dina Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

Teluk Dalam, 31 Juli 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan,



SWASTI ELISABET BUHA, S.Kep., Ns., M.K.M
Pembina
NIP. 19810810 200112 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	51
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	66
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	82
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	84
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	84
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	105
3.3 Program dan Kegiatan.....	106
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	129
BAB V PENUTUP	130
LAMPIRAN	132

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kabupaten Nias Selatan	11
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kerja	34
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kerja	34
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan	36
Tabel 2.3	Data Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB dan Alat Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	47
Tabel 2.4	Data Alat Angkutan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	49
Tabel 2.5	Data Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	49
Tabel 2.6	Data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	45
Tabel 2.7	Data Komputer dan Perlengkapannya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	50
Tabel T-C.31	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	60
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Nias Selatan	68
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87
Tabel 3.2	Sasaran, Indikator dan Target Antara Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	96

T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Nias Selatan.....	114
--------	--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan	45
Gambar 3.1	Skema Perumusan Tujuan Kementerian PPPA	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Data Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	46
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis Renstra Perangkat Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah secara umum mempunyai nilai penting, antara lain digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian Pembangunan Nasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024.

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 32 Tahun 2022 Selatan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;

19. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 5.1_48 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 antara lain:

1. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;
2. Menciptakan keterpaduan program pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
3. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, antara lain:

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
2. Meningkatkan pelayanan utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan secara makro dan pencapaian target Visi Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
3. Sebagai dasar pengukuran kinerja dan evaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dengan Dokumen RKPD dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat apa yang menjadi landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II PENDAHULUAN

Menggambarkan kajian (reviu) terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun Lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada sub bab ini memuat kajian (Reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan serta kaitannya terhadap target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan tahun-tahun sebelumnya yang dilengkapi dengan Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada sub bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, maupun terhadap IKK yang dilengkapi dengan Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada sub bab ini memuat terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada sub bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan, proses Rancangan Awal RKPD, penjelasan temuan-temuan setelah proses

tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD yang dilengkapi dengan Tabel T-C.31 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini berisikan uraian mengenai proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, kesesuaian usulan dan kaitannya terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan yang dilengkapi dengan Tabel T-C.32 Usulan dan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta program dan kegiatan, yang terdiri dari beberapa Sub bab antara lain:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada sub bab ini diuraikan mengenai penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini diuraikan mengenai perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada sub bab ini berisikan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, yang dilengkapi dengan Tabel T-C.33 Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sumber pendanaannya, yang dilengkapi dengan Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2022 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.29 berikut.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kabupaten Nias Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	100 %	98,07 %	98,07%	100 %	100 %	39,61%		
2	14	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	65 Dok	10 Dok	4 Dok	40%	11 Dok	15 Dok	23%	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%

2	14	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
2	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
2	14	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Lap		4 Lap	0 Lap	0%	5 Lap	5 Lap	21%
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 Dok		20 Dok	4 Dok	20%	20 Dok	24 Dok	24%
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330 Org/Bulan		66 Org/Bulan	66 Org/Bulan	100%	66 Org/Bulan	132 Org/Bulan	40%
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Lap		4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	4 Lap	20%
2	14	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%

2	14	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
2	14	01	2.03	03 Koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%
2	14	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	215 Org		70 Org	0 Org	0%	10 Org	10 Org	5%
2	14	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket		70 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0 Paket	0%
2	14	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	60 Org		15 Org	0 Org	0%	15 Org	15 Org	25%
2	14	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %		100 %	23,38 %	23,38%	100 %	100 %	24,68%
2	14	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	94 Paket		1 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	1 Paket	1%
2	14	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	750 Paket		150 Paket	0 Paket	0%	150 Paket	150 Paket	20%
2	14	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	750 Paket		150 Paket	0 Paket	0%	150 Paket	150 Paket	20%
2	14	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	40%
2	14	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	40%
2	14	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Lap		100 Lap	100 Lap	100%	100 Lap	200 Lap	40%

2	14	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dok		12 Dok	0 Dok	0%	12 Dok	12 Dok	20%
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	75 Unit		0 Unit	0 Unit	0%	29 Unit	29 Unit	39%
2	14	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
2	14	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	28 Unit		14 Unit	0 Unit	0%	14 Unit	14 Unit	50%
2	14	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit		4 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	4 Unit	25%
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit		4 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	4 Unit	13%
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	94,89 %	94,89%	100 %	100 %	38,98%
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750 Lap		350 Lap	350 Lap	100%	350 Lap	350 Lap	20%
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap		12 Lap	0 Lap	0%	12 Lap	12 Lap	20%
2	14	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Lap		12 Lap	0 Lap	0%	12 Lap	12 Lap	20%
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	480 Lap		96 Lap	96 Lap	100%	96 Lap	192 Lap	40%
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	211 Unit		51 Unit	23 Unit	45%	40 Unit	63 Unit	30%

2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	20%
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 Unit		25 Unit	22 Unit	88%	25 Unit	47 Unit	38%
2	14	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	2%
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	80 %		70 %	0 %	0%	70 %	70 %	17,50%
						Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	85 %		85 %	0 %	0%	85 %	85 %	20,00%
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,7 %		68,7 %	0 %	0%	69,7 %	70 %	19,17%
2	08	02	201		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dirumuskan	16 Dok		4 Dok	0 Dok	0%	4 Dok	4 Dok	25%
2	08	02	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dok		2 Dok	0 Dok	0%	2 Dok	2 Dok	20%

2	08	02	201	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	70 PD		14 PD	0 PD	0%	14 PD	14 PD	20%
2	08	02	201	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	70 PD		14 PD	0 PD	0%	14 PD	14 PD	20%
2	08	02	202		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dok		2 Dok	0 Dok	0%	2 Dok	2 Dok	20%
2	08	02	202	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dok		2 Dok	0 Dok	0%	2 Dok	2 Dok	20%
2	08	02	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dok		2 Dok	0 Dok	0%	2 Dok	2 Dok	20%
2	08	02	203	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dok		2 Dok	0 Dok	0%	2 Dok	2 Dok	20%

2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	2,11 Kasus per 100000		1,67 Kasus per 100000	0 Kasus per 100000	0%	1,67 Kasus per 100000	1,67 Kasus per 100000	15,83%
2	08	03	201		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15 Dok		3 Dok	0 Dok	0%	3 Dok	3 Dok	20%
2	08	03	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dok		2 Dok	0 Dok	0%	2 Dok	2 Dok	20%
2	08	03	201	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 PD		14 PD	0 PD	0%	14 PD	14 PD	20%
2	08	03	202		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Layanan		5 Layanan	0 Layanan	0%	5 Layanan	5 Layanan	20%
2	08	03	202	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Org		10 Org	0 Org	0%	10 Org	10 Org	20%
2	08	03	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan		10 Layanan	0 Layanan	0%	10 Layanan	10 Layanan	20%
2	08	03	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dok		4 Dok	0 Dok	0%	4 Dok	4 Dok	20%

2	08	03	203	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lap		2 Lap	0 Lap	0%	2 Lap	2 Lap	20%
2	08	03	203	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Org		10 Org	0 Org	0%	10 Org	10 Org	20%
2	08	03	203	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pembangunan Keluarga	57 Poin		57 Poin	0 Poin	0%	57 Poin	57 Poin	20,00%
2	08	04	201		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15 Lap		3 Lap	0 Lap	0%	3 Lap	3 Lap	20%
2	08	04	201	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70 PD		14 PD	0 PD	0%	14 PD	14 PD	20%
2	08	04	201	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%

2	08	04	201	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%
02	08	04	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
02	08	04	202	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga		5 Lembaga	0 Lembaga	0%	5 Lembaga	5 Lembaga	20%
02	08	04	203		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Layanan		5 Layanan	0 Layanan	0%	5 Layanan	5 Layanan	20%
02	08	04	203	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Layanan		5 Layanan	0 Layanan	0%	5 Layanan	5 Layanan	20%
02	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	100 %		100 %	0 %	0%	100 %	100 %	20,00%

02	08	05	201		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 Dok		4 Dok	0 Dok	0%	4 Dok	4 Dok	20%
02	08	05	201	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
02	08	05	201	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
02	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kampung Layak Anak	100 %		100 %	0 %	0%	100 %	100 %	20,00%
02	08	06	201		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dok		2 Dok	0 Dok	0%	2 Dok	2 Dok	20%
02	08	06	201	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 Organisasi		10 Organisasi	0 Organisasi	0%	10 Organisasi	10 Organisasi	20%
02	08	06	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%

02	08	06	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dok		4 Dok	0 Dok	0%	4 Dok	4 Dok	20%
02	08	06	202	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Org		5 Org	0 Org	0%	5 Org	5 Org	20%
02	08	06	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
02	08	06	202	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
02	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	24 %		16 %	15 %	94%	18 %	18 %	27,5%
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	85 %		89 %	45,89 %	52%	88 %	88 %	31,5%
02	14	02	201		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen hasil Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	30 Dok		6 Dok	0 Dok	0%	6 Dok	6 Dok	20%
02	14	02	201	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%

02	14	02	201	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
02	14	02	201	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
02	14	02	201	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50 Organisasi		10 Organisasi	0 Organisasi	0%	10 Organisasi	10 Organisasi	20%
02	14	02	201	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%
02	14	02	201	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%
02	14	02	202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30 Dok		6 Dok	0 Dok	0%	6 Dok	6 Dok	20%
02	14	02	202	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
02	14	02	202	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
02	14	02	202	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah dokumen hasil Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%

02	14	02	202	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	25 Unit		5 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	5 Unit	20%
02	14	02	202	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%
02	14	02	202	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
02	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kampung KB Aktif	100 %		45 %	40 %	89%	100 %	100 %	28,0%
						Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	100 %		45 %	40 %	89%	100 %	100 %	28,0%
02	14	03	201		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %		100 %	89 %	89%	100 %	100 %	37,8%
02	14	03	201	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
02	14	03	201	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	115 Unit		23 Unit	0 Unit	0%	23 Unit	23 Unit	20%

02	14	03	201	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%
02	14	03	201	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK yang tersedia	15 Media		3 Media	0 Media	0%	2 Media	2 Media	13%
02	14	03	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%
02	14	03	201	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%
02	14	03	201	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%
02	14	03	202		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayagunaka	180 Org		36 Org	36 Org	100%	36 Org	72 Org	40%

02	14	03	202	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	50 Organisasi	10 Organisasi	0 Organisasi	0%	10 Organisasi	10 Organisasi	20%
02	14	03	202	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	175 Unit	35 Unit	0 Unit	0%	35 Unit	35 Unit	20%
02	14	03	202	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	40%
02	14	03	203		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	40%
02	14	03	203	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	40%
02	14	03	203	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	75 Org	15 Org	0 Org	0%	15 Org	15 Org	20%
02	14	03	203	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	750 Org	150 Org	0 Org	0%	150 Org	150 Org	20%

02	14	03	203	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
02	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	25 Unit		5 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	5 Unit	20%
02	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20 Lap		4 Lap	0 Lap	0%	4 Lap	4 Lap	20%
02	14	03	203	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	25 Org		5 Org	0 Org	0%	5 Org	5 Org	20%
02	14	03	203	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20 Lap		4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	8 Lap	40%
02	14	03	203	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	50 Org		10 Org	0 Org	0%	10 Org	10 Org	20%
02	14	03	204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	390 Kampung KB		78 Kampung KB	78 Kampung KB	100%	78 Kampung KB	156 Kampung KB	40%
02	14	03	204	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	390 Dok		78 Dok	0 Dok	0%	78 Dok	78 Dok	20%
02	14	03	204	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	390 Kampung KB		78 Kampung KB	78 Kampung KB	100%	78 Kampung KB	156 Kampung KB	40%

02	14	03	204	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	20 Lap		4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	8 Lap	40%
02	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	80 %		50 %	20 %	40%	60 %	60 %	20%
						Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR-PIKR) Aktif	80 %		40 %	12 %	30%	60 %	60 %	18%
						Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif	80 %		50 %	10,39 %	20,78%	50 %	50 %	15%
02	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan	80 %		80 %	42,39 %	52,99%	80 %	80 %	31%
02	14	04	201	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	390 Kampung KB		78 Kampung KB	78 Kampung KB	100%	78 Kampung KB	156 Kampung KB	40%
02	14	04	201	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 Unit		20 Unit	0 Unit	0%	20 Unit	20 Unit	20%
02	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.305 Org		461 Org	0 Org	0%	461 Org	461 Org	20%

02	14	04	201	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	5 Dok		1 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
02	14	04	202		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%
02	14	04	202	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	5 Lap		1 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	20%

Dari Tabel T-C.29 di atas diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
 - 1) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 1 (satu) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 70 (tujuh puluh) orang sedangkan capaian 0 (nol).
 - 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 29 (dua puluh Sembilan) unit sedangkan capaian 0 (nol) unit.
 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, antara lain:
 - 1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) dokumen sedangkan capai 0 (nol) dokumen.
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan

Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 2 (dua) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.

- 3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 2 (dua) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.

3. Program Perlindungan Perempuan, antara lain:

- 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan target 3 (tiga) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 5 (lima) layanan sedangkan capaian 0 (nol) layanan.
- 3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 4 (empat) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, antara lain:

- 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 3 (tiga) laporan sedangkan capaian 0 (nol) laporan.
- 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 (satu) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.
- 3) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 5 (lima) layanan sedangkan capaian 0 (nol) layanan.

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, antara lain:
 - 1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 4 (empat) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), antara lain:
 - 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 2 (dua) dokumen dengan capaian 0 (nol) dokumen.
 - 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota target 4 (empat) dokumen dengan capaian 0 (nol) dokumen.
7. Program Pengendalian Penduduk, antara lain:
 - 1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan target 6 (enam) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.
 - 2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 6 (enam) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), antara lain:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan target 1 (satu) laporan sedangkan capaian 0 (nol) laporan.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target tercapai 100%.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target tercapai 100%.
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah target tercapai 23.38%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target tercapai 94,89%.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target tercapai 58%.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), antara lain:
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal target tercapai 89%.
 - 2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) target tercapai 100%.
 - 3) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota target tercapai 100%.
 - 4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB target tercapai 100%.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), antara lain:
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga target tercapai 52.99%.

Secara umum persentase realisasi program/kegiatan yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 80,14% dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,07%.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana sebesar 97,26%.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebesar 52,99%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yakni keterbatasan anggaran dan beberapa program yang belum menjadi Program Prioritas sedangkan implementasi yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut yakni perlu adanya penambahan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai renstra OPD dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan. Kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan berdasarkan indikator kinerja antara lain:

1. Nilai Lakip.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Persentase KB Aktif.
4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*).
5. Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan.
6. *Total Fertility Rate* (TFR).

Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut maka dilakukan pengukuran kinerja dengan menghitung Nilai Capaian Indikator Kinerja terhadap 6 indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 dilakukan pengukuran kinerja dan didapatkan nilai capaian indikator kinerja untuk setiap kegiatan, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap capaian tersebut. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator Kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Lakip	C	C	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	C	C	100%

Berdasarkan capaian indikator kinerja pada tabel di atas, didapatkan Nilai Lakip dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target Predikat C sedangkan realisasinya Predikat C. Sehingga persentase rata-rata capaian indikator di atas sebesar 100%.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KB Aktif	45%	40%	89%
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	45%	45,89%	101,98%
3	Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan	80%	50%	63%
4	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	3,5	3,18	90,86%

Berdasarkan capaian indikator kinerja pada tabel di atas, Persentase KB Aktif dengan target 45%, realisasi 40% dan capaiannya 89%, Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) dengan target 45%, Realisasi 45,89% dan capaiannya 101,89%, Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan dan dengan target 80%, realisasi 50% dan capaiannya 63%, *Total Fertility Rate* (TFR) dengan poin 3,5, realisasi 3,18 dan capaiannya 90,86%. Dengan demikian persentase rata-rata dari 4 capaian indikator di atas sebesar 86%.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat diuraikan pada Tabel T-C.30 berikut.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Lakip			C	CC	B	B	C	C	B	B	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			C	CC	B	B	C	C	B	B	
3	Persentase KB Aktif			45%	50%	60%	70%	40%	55%	60%	70%	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)			45%	50%	60%	70%	45,89%	47%	48%	46%	
5	Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan			80%	80%	85%	90%	50%	60%	75%	85%	
6	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>			3,50	3,50	3,42	3,34	3,18	3,14	3,10	3,08	

2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian Visi Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 "***Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera***".

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, maka tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian pengembangan penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi antara lain:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 2) Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah.
 - 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- 4) Penetapan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan.
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 6) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana.
- 7) Pengkoordinasian dan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan Kabupaten Nias Selatan, termasuk dana, sarana dan prasarana.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 2) Penyusunan rencana program dan anggaran.
 - 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.
 - 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.
- c. Sekretaris dibantu 3 (tiga) Subbagian, terdiri atas:

- 1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.
 - 2) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.
 - 3) Subbagian Keuangan dan Sarana, mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
- a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di Kabupaten Nias Selatan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 3) Pelaksanaan NSPK di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- 4) Pelaksanaan Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas Penduduk.
 - 5) Pelaksanaan Pemetaan perkiraan (Parameter) Pengendalian Penduduk di Kabupaten Nias Selatan.
 - 6) Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 7) Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).
 - 8) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 10) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:
- 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan Penggerakan.
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

- 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Nias Selatan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 3) Pelaksanaan NSPK di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 4) Pelaksanaan sistem informasi Gender dan Anak serta pengelolaan Website (e-gov).
 - 5) Pelaksanaan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan, penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data tentang informasi Gender dan Anak.
 - 6) Pemberian bimbingan Teknis dan fasilitasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 7) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang.

2) Seksi Perlindungan Anak

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pemenuhan hak anak terkait hak sipil, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan Budaya.

3) Seksi Informasi Gender dan Anak

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Informasi gender dan Anak serta pengelolaan website (e-Gov).

5. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:

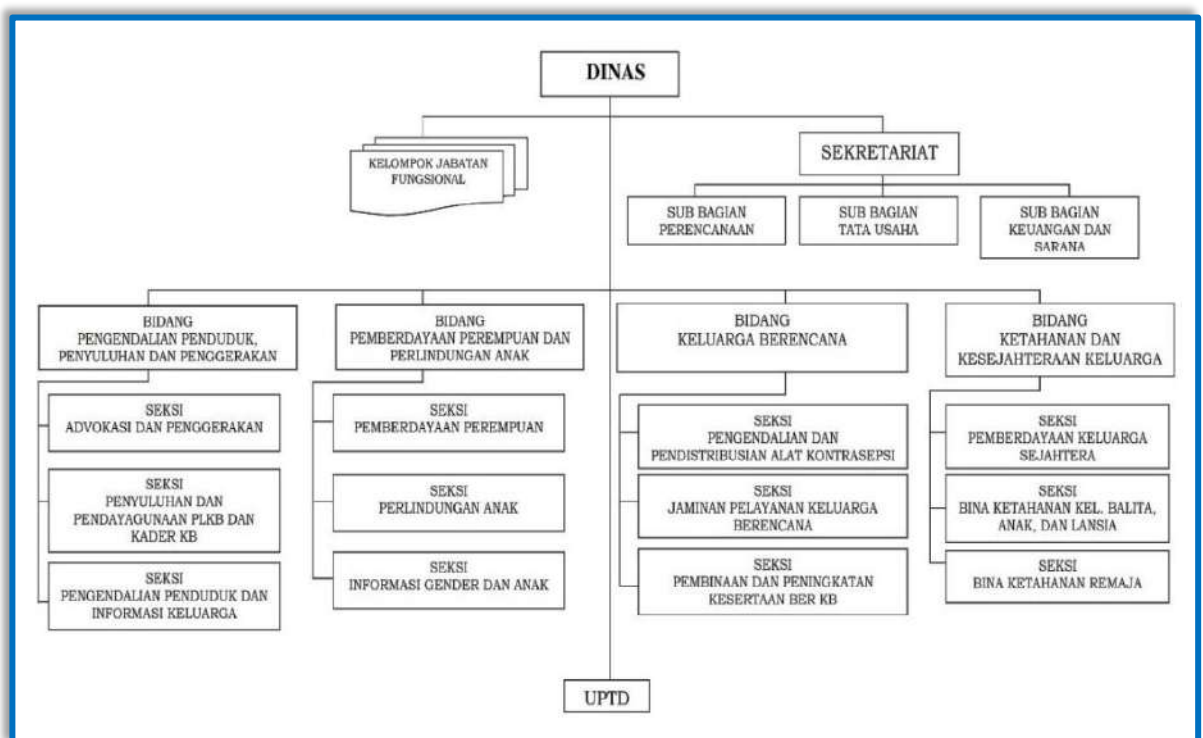
- a. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana di Kabupaten Nias Selatan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.
 - 3) Pelaksanaan Penyelenggaraan norma, Standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana.
 - 4) Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian alat obat Kontrasepsi di Kabupaten Nias Selatan.

- 5) Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten Nias Selatan.
 - 6) Pelaksanaan Pembinaan Kesertaan be KB di Kabupaten Nias Selatan.
 - 7) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di bidang Keluarga Berencana.
 - 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana.
 - 9) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Keluarga Berencana dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:
- 1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian Alokon di Kabupaten Nias Selatan.
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan KB
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Jaminan Pelayanan KB di Kabupaten Nias Selatan.
 - 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan Ber KB.
6. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
- a. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Nias Selatan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 3) Pelaksanaan NSPK di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 4) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Pembinaan Ketahanan Remaja.
 - 5) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan.
 - 6) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha mikro Keluarga.
 - 7) Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 8) Pemberian Bimbingan Teknis dan Fasilitasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 9) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:
- 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
 - 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja

Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan Ketahanan Remaja.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan



2.1.2 Sumber Daya Manusia

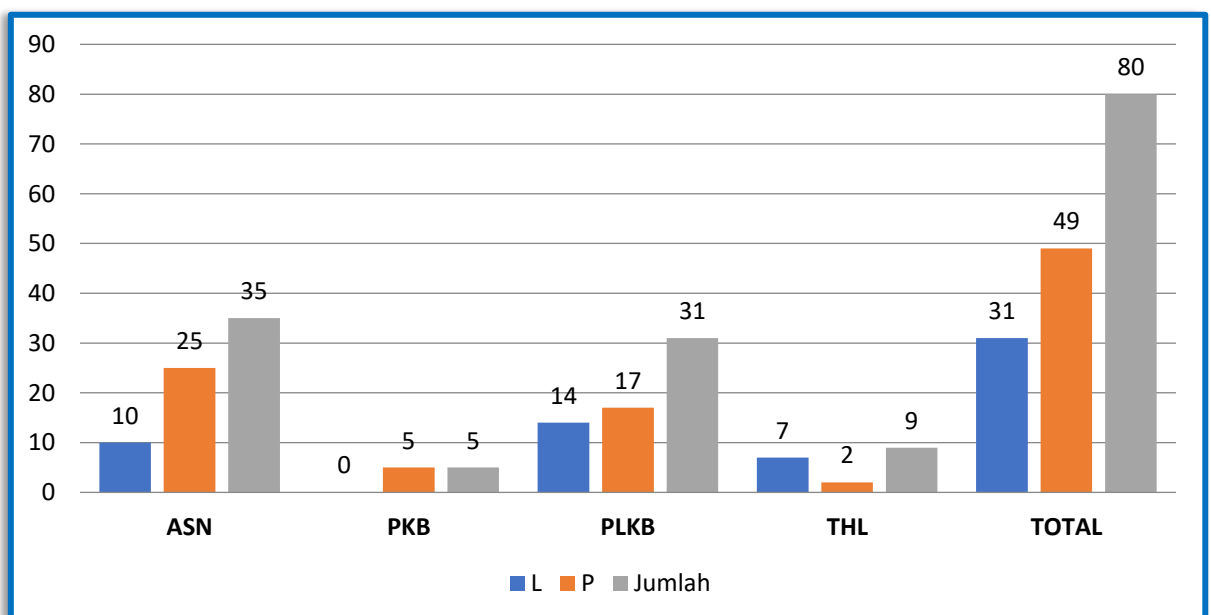
Sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah ke depan.

Untuk itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan

akan berupaya secara terus menerus setiap tahunnya melakukan peningkatan dan penguatan sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mencapai pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Bupati selaku Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak serta keluarga berencana. Tentunya hal tersebut dapat terlaksana dengan dukungan sumber daya aparatur dan dukungan kapasitas aset/modal pendukung.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD, maka program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan oleh 80 orang, yang terdiri dari ASN berjumlah 35 orang, PKB berjumlah 5 orang, PLKB berjumlah 31 orang, THL berjumlah 9 orang.

Grafik 2.1
Data Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022



2.1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Maka untuk menunjang kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, perlu adanya ketersediaan sarana dan prasarana.

Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

1. Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB dan Alat Kontrasepsi.
2. Alat Angkutan.
3. Alat Kantor dan Rumah Tangga.
4. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.
5. Komputer dan Perlengkapannya.

Dari 6 (enam) sarana dan prasarana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan di atas dapat diuraikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Data Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB dan Alat Kontrasepsi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Nama Bangunan/Gedung	Jumlah	Kondisi Bangunan
1	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Fanayama	1	Kurang Baik
2	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Lahusa	1	Kurang Baik
3	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Gomo	1	Kurang Baik

4	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Mazino	1	Kurang Baik
5	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Maniamolo	1	Kurang Baik
6	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Somambawa	1	Kurang Baik
7	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Toma	1	Kurang Baik
8	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Luahagundre Maniamolo	1	Kurang Baik
9	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Aramo	1	Kurang Baik
10	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Hilimegai	1	Kurang Baik
11	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Onolalu	1	Kurang Baik
12	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Lolowau	1	Kurang Baik
13	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. O'o'u	1	Kurang Baik
14	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Hilisalawa'ahe	1	Kurang Baik
15	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Boronadu	1	Kurang Baik
16	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Ulunoyo	1	Kurang Baik
17	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Pulau-Pulau Batu	1	Kurang Baik
18	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Lolomatua	1	Baik
19	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Sidua'ori	1	Baik
20	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Susua	1	Baik
21	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Mazo	1	Baik
22	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Ulu Idanotae	1	Baik
23	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Huruna	1	Baik
24	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Amandraya	1	Baik
25	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Teluk Dalam	1	Baik
26	Gedung/Gudang Alat Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Baik
Total		26	

Tabel 2.4
**Data Alat Angkutan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022**

No	Jenis Alat Angkutan	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Roda 4 (Bus Mini)	1	Baik
2	Kendaraan Roda 2	20	Baik
Total		21	

Tabel 2.5
**Data Alat Kantor dan Rumah Tangga
 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022**

No	Jenis Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah	Kondisi
1	Meja ½ Biro	20	Baik
2	Meja Biro	13	Baik
3	Meja Kerja Pejabat	10	Baik
4	Lemari Kayu	13	Baik
5	Kursi Putar	11	Baik
6	Kursi Meja	12	Baik
7	AC Split	3	Baik
8	Kursi Plastik	20	Baik
9	Tempat Sampah Plastik	10	Baik
Total		112	

Tabel 2.6
Data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Jenis Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Jumlah	Kondisi
1	Proyektor	1	Baik
2	Samsung Galaxy Tab A	17	Baik
Total		18	

Tabel 2.7
Data Komputer dan Perlengkapannya
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Jenis Komputer dan Perlengkapannya	Jumlah	Kondisi
1	Personal Komputer	2	Rusak Berat
2	Personal Komputer (Lenovo)	11	Baik
3	Komputer PC	1	Baik
4	Komputer Set (Asus V200 All-In-One PC)	1	Baik
5	Komputer Set (Lenovo)	1	Baik
6	Printer (Epson L120)	1	Rusak Berat
7	Printer (HP Laser Jet Pro M102a)	2	Rusak Berat
8	Printer (Epson L360)	1	Baik
9	Printer (Epson L120)	1	Rusak Ringan
10	Printer (Epson L120)	1	Baik
11	Printer (Epson L5190)	1	Baik

12	Printer (Epson L3110)	1	Baik
Total		24	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan melalui program yang dilaksanakan secara komprehensif, haruslah menjadi komitmen dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, bidang Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, karena isu strategis adalah merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Untuk menentukan isu-isu strategis tersebut, maka perlukan dilakukan identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya diuraikan untuk masing-masing bidang sebagai pelaksana urusan non pelayanan dasar termasuk juga Sekretariat sebagai unsur *service center* adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat
 - a. Kualitas pelayanan informasi publik yang belum sesuai dengan standar.

- b. Pemanfaatan SDM di perangkat daerah belum sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki.
 - c. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang masih kurang.
 - d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- a. Belum adanya *grand design* kependudukan.
 - b. Masih kurangnya kualitas dan jumlah SDM Tenaga Penyuluh KB.
 - c. Masih kurangnya informasi dalam parameter pengendalian penduduk.
 - d. Pengendalian penduduk belum bisa terpantau dengan jelas karena belum ada analisis data kependudukan yang spesifik dan berkala.
3. Bidang Keluarga Berencana
- a. Masih tingginya *Unmet Need* (Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi).
 - b. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan setiap keluarga.
 - c. Masih rendahnya pengetahuan PUS tentang metode dan alat kontrasepsi.
 - d. Masih tingginya perkawinan usia muda.
 - e. Masih rendahnya Kesertaan KB Pria dan peranan pria dalam ber KB.
 - f. Masih rendahnya kesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
 - g. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas PPKBD dan Sub PPKBD.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah.
 - b. Masih rendahnya perangkat daerah menyajikan data terpilah terhadap hasil kegiatannya.
 - c. Belum optimalnya perangkat daerah menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

- d. Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- e. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Pelayanan terhadap korban kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang belum maksimal.
- g. Keterbatasan anggaran fasilitas pendampingan dan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.
- h. Belum semua korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan pada PPT.
- i. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum.
- j. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.

5. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Menurunnya fungsi pengawasan dan perlindungan dalam keluarga.
- b. Semakin renggangnya pola relasi di dalam keluarga dan masyarakat dari akibat perkembangan teknologi informasi.
- c. Meningkatnya permasalahan psikososial pada remaja, terlihat dengan meningkatnya kasus kenakalan remaja, pernikahan usia dini, dan kehamilan tidak diinginkan.
- d. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan *stunting* melalui peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita.
- e. Masih tingginya prevalensi *stunting*.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan di atas, maka didapatkan isu-isu strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan meliputi:

1. Penggerakan dan Pelayanan KB.

2. Pencegahan dan penanganan *stunting* melalui peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita.
3. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak
4. Kualitas dan kompetensi SDM perencana bagi Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
5. Pemberdayaan keluarga sejahtera dalam penanganan *stunting*.
6. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Dalam hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan fokus pada Misi I (Kesatu) yaitu *“Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan”* dan Misi II (Kedua) yaitu *“Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif”*.

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja yang menjadi urusan penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan antara lain:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target capaian 70,7 poin.
2. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan target capaian 23%.
3. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (II) dengan target capaian 17,65%.
4. Persentase kampung layak anak dengan target capaian 100%.
5. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dengan target capaian 100%.

6. *Unmet Need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) dengan target capaian 87%.
7. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern dengan target capaian 20%.
8. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin dengan target capaian 20%.
9. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) dengan target capaian 0,7%.
10. Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive* (mCPR) dengan target capaian 20%.
11. Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif dengan target capaian 60%.

Maka untuk mencapai Misi tersebut, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi target capaian indikator kinerja di atas antara lain:

1. Aspek ekonomi dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) melalui sumbangan pendapatan perempuan yang dapat menunjukkan bagaimana perempuan berperan dan berkontribusi secara finansial yang mengindikasikan adanya kemandirian perempuan secara ekonomi yang dapat berdampak pada relasi yang lebih setara dan kemampuan kontrol yang otonom.
2. Kebijakan partai politik yang bias gender dan pengambilan keputusan yang masih didominasi laki-laki, pendidikan publik yang dilakukan media untuk mendorong representasi perempuan di parlemen masih belum maksimal, faktor lain sumber dana kampanye di dalam keluarga dan relasi gender antara perempuan dengan suaminya mengakibatkan adanya kekhawatiran dapat terjebak pada tindakan tidak bermoral dan melanggar hukum seperti korupsi atau lainnya.
3. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi *mainstream* bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.
5. Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak misalnya menderita gangguan perkembangan, retardasi mental, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri, pola asuh orang tua yang membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan serta faktor media masa/elektronik yang menampilkan adegan kekerasan/perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan. Walaupun pada hakikatnya media massa/elektronik memiliki efek yang positif, namun kadang juga memiliki efek yang negatif.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian *unmet need* adalah usia, pendidikan, pekerjaan, paritas, dan dukungan suami. Usia >35 tahun merasa sudah tua sehingga kemungkinan untuk terjadi kehamilan sangat kecil berdampak pada kejadian *unmet need*. Bagi seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan mempunyai pengetahuan lebih luas dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pekerjaan dapat mempengaruhi kejadian *unmet need*, karena adanya kesibukan dan kurangnya kesempatan dalam mengakses alat kontrasepsi. Paritas/jumlah anak mempengaruhi seseorang dalam menggunakan alat kontrasepsi. Dukungan suami dan perhatian suami berpengaruh pada kejadian *unmet need* dukungan suami yang baik terhadap perilaku ber-KB akan menurunkan kejadian *unmet need*.
7. Faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi metode modern pada Pasangan Usia Subur (PUS) meliputi usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat pengetahuan, dukungan suami dan informasi dari PLKB/PKB.
8. Peningkatan pengetahuan tentang penggunaan metode kontrasepsi tidak hanya bagi wanita tetapi juga bagi pria melalui sarana KIE seperti pemberian brosur yang berisi informasi tentang kontrasepsi yang menarik

sehingga mudah dipahami, serta peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan kontrasepsi.

9. Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka kelahiran pada perempuan berumur 15-19 tahun adalah angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan jumlah penduduk miskin.
10. Tingkat pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*).
11. Tingkat pemahaman keluarga tentang pencegahan *stunting* dan pola pengasuhan bayi yang kurang baik.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Program Nasional/Internasional

Dampak terhadap pencapaian Program Nasional salah satunya adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, antara lain:

1. Tanpa Kemiskinan.
2. Tanpa Kelaparan.
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera.
4. Pendidikan Berkualitas.
5. Kesenjangan Gender.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak.
7. Energi Bersih dan Terjangkau.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur.

10. Berkurangnya Kesenjangan.
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.
13. Penanganan Perubahan Iklim.
14. Ekosistem Lautan.
15. Ekosistem Daratan.
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan mempunyai peranan penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama pada tujuan 2 (kedua) yaitu Tanpa Kelaparan, tujuan 3 (ketiga) yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera dan tujuan 5 (kelima) yaitu Kesetaraan Gender.

Tujuan 1 (pertama) Tanpa Kemiskinan, memiliki beberapa target dan indikator yang menjadi fokus utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. Sedangkan indikatornya, tingkat kemiskinan ekstrem dan Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur serta Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
2. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerja sama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. Sedangkan indikatornya, proporsi sumber daya yang

dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

3. Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan. Sedangkan indikatornya, Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.

Tujuan 2 (kedua) Tanpa Kelaparan, memiliki target yakni pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Sedangkan indikator yang menjadi fokus utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan yakni prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

Tujuan 3 (ketiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, memiliki target yakni pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Sedangkan indikator yang menjadi fokus utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan yakni proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern, angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama, *Total Fertility Rate* (TFR).

Tujuan 5 (kelima) Kesetaraan Gender memiliki beberapa target dan indikator yang menjadi fokus utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Sedangkan indikatornya Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Sedangkan indikatornya antara lain:
 - b. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
 - c. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Sedangkan indikatornya antara lain:
 - a. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
 - b. Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM (*Female Genital Mutilation*), menurut kelompok umur.
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
 - a. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan pemerintah daerah.

- b. Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.
- 5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut. Sedangkan indikatornya antara lain:
 - a. Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.
 - b. Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
- 6. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan. Sedangkan indikatornya ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan (*Threats*)

Adapun tantangan-tantangan (*threats*) yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan Tenaga PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) tentang tugas dan fungsinya.
- b. Belum terpenuhinya ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di setiap Kecamatan.
- c. Konflik peran sangat mempengaruhi strategi perlindungan perempuan dan anak.

- d. Disparitas Indeks Pembangunan Gender antar Desa/Kelurahan yang menunjukkan angka yang bervariasi, namun antar Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan hal itu belum maksimal digambarkan/dipetakan.
- e. Meningkatnya kasus kekerasan pada Anak dan Perempuan.
- f. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level.
- g. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG).
- h. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- i. Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja.
- j. Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah.
- k. Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak.
- l. Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB.
- m. Belum optimalnya pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak, dikarenakan masih belum ada regulasi (Peraturan Bupati) yang mengatur tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nias Selatan.
- n. Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dikarenakan masih belum ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

2. Peluang (*Opportunities*)

Adapun peluang (*opportunities*) bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, antara lain:

- a. Adanya Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur pada Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana diatur pada Pasal 7. Dengan demikian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sebagai OPD yang membidang Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara teknis memiliki peranan penting dalam proses pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Nias Selatan.
- b. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Maka untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di setiap Kecamatan, OPD terkait dapat untuk mengusulkan penambahan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana melalui perpindahan dari jabatan lain dengan memprioritaskan PNS Daerah. Sebagaimana diatur pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa

- Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB dapat dilakukan melalui: pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan/atau promosi.
- c. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nias Selatan. Dalam Perda tersebut pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ayat (2) menyatakan bahwa Forum Anak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - d. Adanya Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.8_239 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nias Selatan.
 - e. Adanya Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.8_301 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dengan adanya regulasi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Nias Selatan.
 - f. Banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap program PUG.

- g. Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial.
- h. Tersedianya organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Tersedianya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja.
- j. Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- k. Kemajuan teknologi informasi.
- l. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mendukung keluarga berencana.
- m. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- n. Tersedianya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
- o. Kemudahan informasi tentang KB.
- p. Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Penting yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan Program dan Kegiatan prioritas tahun 2024 yaitu:

1. Penambahan ASN khusus pada Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) untuk memenuhi Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana.
2. Peningkatan kompetensi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) melalui Pendidikan dan Pelatihan.
3. Penggerakan dan Pelayanan KB.
4. Peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita dalam pencegahan dan penanganan *stunting*.
5. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak
6. Pemberdayaan keluarga sejahtera dalam penanganan *stunting*.
7. Penambahan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.
8. Penurunan angka kemiskinan ekstrem.
9. Pengarusutamaan hak anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dibandingkan dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, maka Renja Tahun 2024 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Nias Selatan.

Dengan demikian sangat penting untuk menyusun Renja OPD dengan acuan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antara Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, penjabaran



Program dan Kegiatan berdasarkan reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 tertuang pada Tabel T-C.31 berikut:

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024
Kabupaten Nias Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING					Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Nias Selatan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	70% 85% 70,7%	27.000.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Nias Selatan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	70% 85% 70,7%	27.000.000		
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen kebijakan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dirumuskan	3 Dokumen	19.000.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen kebijakan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dirumuskan	4 Dokumen	19.000.000		
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.000.000		
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengrusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	15.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Perangkat Daerah	15.000.000		
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Perangkat Daerah	-	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Perangkat Daerah	-		
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.000.000		
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.000.000		

KODE REKENING					Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.000.000	
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	4.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	4.000.000	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Nias Selatan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	1,67 Kasus per 100.000	99.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Nias Selatan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	1,67 Kasus per 100.000	99.000.000	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	29.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	29.000.000	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.000.000	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	25.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Perangkat Daerah	25.000.000	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	40.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	40.000.000	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	10.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	10.000.000	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	30.000.000	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	30.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	30.000.000	

KODE REKENING					Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.000.000	
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Orang	10.000.000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Orang	10.000.000	
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Nias Selatan	Indeks Pembangunan Keluarga	57,00 Poin	70.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Nias Selatan	Indeks Pembangunan Keluarga	57,00 Poin	70.000.000	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	45.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	45.000.000	
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Perangkat Daerah	20.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Perangkat Daerah	20.000.000	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	15.000.000	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	

KODE REKENING					Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	REKONSTRUKSI DAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Lembaga	10.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Lembaga	10.000.000	
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	5 Layanan	15.000.000	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	5 Layanan	15.000.000	
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Layanan	15.000.000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Layanan	15.000.000	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Nias Selatan	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	100%	10.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Nias Selatan	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	100%	10.000.000	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	10.000.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	10.000.000	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5.000.000	
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	

KODE REKENING					Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Nias Selatan	Persentase kampung layak anak	100%	125.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Nias Selatan	Persentase kampung layak anak	100%	125.000.000	
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	45.000.000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	45.000.000	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	15.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	15.000.000	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	80.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	80.000.000	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20.000.000	
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Nias Selatan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	11.161.716.089	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Nias Selatan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	10.706.716.089	

KODE REKENING					Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 Dokumen	45.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 Dokumen	60.000.000	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.500.000	
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.500.000	
2	14	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.500.000	
2	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.500.000	
2	14	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.500.000	
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.500.000	
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	9.000.000	
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	20 Dokumen	4.612.766.089	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	20 Dokumen	4.612.766.089	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	4.590.266.089	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/Bulan	4.590.266.089	
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.500.000	
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	7.500.000	

KODE REKENING					Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
2	14	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.500.000	
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dikelola Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dikelola Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	
2	14	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	10.000.000	
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	45 Orang	145.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	15 Orang	67.500.000	
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Paket	70.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Paket	67.500.000	
2	14	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	67.500.000	
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Persentase tersedianya layanan pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.110.450.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Persentase tersedianya layanan pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	680.600.000	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.100.000	
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	126.000.000	
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	150 Paket	80.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	150 Paket	12.500.000	
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	302.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	102.850.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	470.000.000	
2	14	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	33.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	-	
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	18 Unit	2.490.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	18 Unit	4.547.350.000	

KODE REKENING					Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	14	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	450.000.000	
2	14	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	490.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	-	
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Mebel	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	55.000.000	
2	14	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Umbunasi, Kec. Simuk, Kec. Pulau-Pulau Barat, Kec. Pulau-Pulau Batu Utara	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Umbunasi, Kec. Simuk, Kec. Pulau-Pulau Barat, Kec. Pulau-Pulau Batu Utara	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4.022.350.000	
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	148.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	148.500.000	
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	3.500.000	
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	
2	14	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000	
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	115.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	115.000.000	
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	40 Unit	2.600.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	77 Unit	580.000.000	
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000	
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	50.000.000	
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	50.000.000	
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	360.000.000	
2	14	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	2.500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	100.000.000	

KODE REKENING					Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Nias Selatan	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	20%	335.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Nias Selatan	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	20%	335.000.000		
							Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	87%					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		87%	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	6 Dokumen	190.000.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	6 Dokumen	190.000.000		
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBP)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBP)	1 Dokumen	20.000.000	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBP)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBP)	1 Dokumen	20.000.000		
2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	- Dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	-		
2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	20.000.000		
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Organisasi	50.000.000	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 Organisasi	50.000.000		
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan	50.000.000		
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program KKBP (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program KKBP (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	50.000.000		
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	145.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	145.000.000		
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	15.000.000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	15.000.000		
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	15.000.000		

KODE REKENING					Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Rebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	14	2	202	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini)	Kab. Nias Selatan				Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini)	Kab. Nias Selatan				
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Nias Selatan	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	5 Unit	100.000.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Nias Selatan	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	5 Unit	100.000.000	
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	15.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	15.000.000	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Nias Selatan	Persentase Kampung KB Aktif	100%	3.315.250.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Nias Selatan	Persentase Kampung KB Aktif	100%	1.960.000.000	
							Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	100%				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	100%		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	940.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	700.000.000	
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	15.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	10.000.000	
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23 Unit	230.000.000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23 Unit	180.000.000	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	15.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	10.000.000	
2	14	03	2.01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Nias Selatan				Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Nias Selatan				

KODE REKENING						Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	14	03	2.01	06		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok)	78 Laporan	390.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok)	78 Laporan	250.000.000	
2	14	03	2.01	07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23 Laporan	115.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23 Laporan	100.000.000	
2	14	03	2.01	08		Pengendalian Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	35 Laporan	175.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	35 Laporan	150.000.000	
2	14	03	2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan	35 Orang	205.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan	35 Orang	160.000.000	
2	14	03	2.02	01		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	35 Organisasi	175.000.000	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	35 Organisasi	140.000.000	
2	14	03	2.02	02		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	- Unit	-	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	- Unit	-	
2	14	03	2.02	03		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	30.000.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	20.000.000	
2	14	03	2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan	100%	842.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan	100%	460.000.000	
2	14	03	2.03	01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47 Laporan	50.000.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47 Laporan	40.000.000	

KODE REKENING					Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Orang	30.000.000	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Orang	20.000.000	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Orang	-	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Orang	-	
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	47 Dokumen	82.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	47 Dokumen	60.000.000	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	50.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	40.000.000	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	41 Laporan	50.000.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	41 Laporan	40.000.000	
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	5 Orang	30.000.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	5 Orang	20.000.000	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	500.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	200.000.000	
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Nias Selatan	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	10 Orang	50.000.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Nias Selatan	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	10 Orang	40.000.000	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	78 Kampung KB	1.328.250.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	78 Kampung KB	640.000.000	
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	78 Dokumen	1.328.250.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	78 Dokumen	640.000.000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Nias Selatan	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	60%	3.507.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Nias Selatan	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	60%	2.320.649.911	
							Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR-PIKR) Aktif	70%				Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR-PIKR) Aktif	70%		
							Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif	60%				Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif	60%		

KODE REKENING					Rancangan Awal RKPD Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	3.477.800.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	2.290.649.911	
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	78 Kelompok	1.155.000.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	78 Kelompok	1.155.000.000	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	100.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	100.000.000	
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	461 Orang	2.212.800.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	461 Orang	1.025.649.911	
2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	10.000.000	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	10.000.000	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	30.000.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	30.000.000	
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	30.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	30.000.000	
TOTAL									18.650.766.089	TOTAL				15.653.366.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil desk Forum Perangkat Daerah dan usulan Musrenbang Kecamatan serta usulan Pokir DPRD, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan belum mendapatkan usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan. Akan tetapi walaupun belum terakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan akan selalu berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kinerja sesuai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 disajikan ke dalam Tabel T-C.32 berikut.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Nias Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2019-2024 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada masa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2019.

a) Visi Kementerian PPPA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong". Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kementerian PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka

Kementerian PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kementerian PPPA tahun 2020-2024 yaitu: “Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

b) Misi Kementerian PPPA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kementerian PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO.
2. Peningkatan perlindungan anak.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kementerian PPPA didasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kementerian PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan tujuan Kementerian PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kementerian PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak” dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “Perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.
4. Indeks Perlindungan Anak (IPA).
5. Persentase ARG pada belanja langsung APBD.

Penyusunan tujuan Renstra Kementerian PPPA juga memperhatikan 5 arahan Presiden, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak.
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4. Penurunan pekerja anak.
5. Pencegahan perkawinan anak.

Gambar 3.1
Skema Perumusan Tujuan Kementerian PPPA



Dimana Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
4	Indeks PUG Nasional
5	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
6	Proporsi Perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun
7	Jumlah Kabupaten/Kota dengan peringkat menuju KLA
8	Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
9	Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat
10	Indeks Kualitas Keluarga
11	Prevalensi Perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami

	kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan
12	Persentase pemula yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar
13	Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya
14	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan Komprehensif
15	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
16	Indeks Reformasi Birokrasi
17	Opini BPK atas Laporan Keuangan
18	Tingkat Maturitas SPIP
19	Nilai SAKIP

c) Sasaran Strategis Kementerian PPPA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif.

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis

yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi.
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan.
- c. Tingkat Maturitas SPIP.
- d. Nilai SAKIP.

3.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Agenda Pembangunan Nasional selama 20 tahun telah di tuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV Tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup antara lain: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur,

Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada Prioritas Nasional “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dan Prioritas Nasional “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing:

- a. Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan Kegiatan Prioritas (KP) ada 2 (dua) yakni Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- b. Program Prioritas (PP) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan Kegiatan Prioritas yakni Kesejahteraan Sosial.
- c. Program Prioritas (PP) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan Kegiatan Prioritas yakni:
 - 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi.
 - 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk:

- 1) Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi.
- 2) Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah.

- 3) Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender.
 - 4) Peningkatan kompetensi PKB/PLKB.
 - 5) Penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi.
 - 6) Penguatan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.
2. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan Program Prioritas Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan Kegiatan Prioritas Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari Kegiatan Prioritas tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:
- a. Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
 - b. Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
 - c. Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
 - d. Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai

fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia Periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
 - a. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 - b. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
 - c. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 - d. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
 - e. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
 - f. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
 - g. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
2. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
 - a. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - b. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - d. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
 - a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.

- b. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
 - c. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - d. Peningkatan KB Pria.
 - e. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
 - f. Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
4. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - b. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- a. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
 - b. Pengembangan *Smart Technology*/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

3.1.3 Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

Pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* melalui rencana aksi nasional dengan pendekatan keluarga berisiko *stunting* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

Adapun yang melatarbelakangi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yakni agenda pembangunan sumber daya manusia

berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sehingga penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia 2045 serta mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.

Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan *Stunting* yang merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition* (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, *Stunting* terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* telah ditetapkan 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, dan untuk memperkuat pelaksanaannya mengamanatkan disusunnya rencana aksi nasional, mekanisme tata kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan menjadi panduan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Tujuan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, antara lain:

1. Melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan *Stunting* tingkat pusat, daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan.

2. Melakukan penguatan dan pepaduan sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan *Stunting*.
3. Melakukan penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam percepatan penurunan *Stunting*.
5. Mengintegrasikan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan percepatan penurunan *Stunting*.
6. Melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*.

Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan *Stunting* adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada tahun 2024. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dari upaya percepatan penurunan *Stunting* di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Sasaran, Indikator dan Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90
	b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	80
	c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	58
	d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	80

	e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	80
	f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	90
	g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	90
	h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90
	i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	a. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	70
	b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	15,5
	c. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (persen).	90
	d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	100
	e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	90
	f. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan (juta).	112,9
	g. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan (persen).	90
	h. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (juta).	10,0
	i. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	70
	j. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan (juta).	15,6
	k. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF).	90

Target dan sasaran percepatan penurunan *Stunting* dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan sasaran dan target sebagai berikut:

1. **Pilar 1** : Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa
 - a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan *Stunting*.
 - 1) Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - 2) Terselenggaranya koordinasi di kabupaten/kota;
 - 3) Terselenggaranya rembuk *Stunting* tingkat kecamatan;
 - 4) Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *Stunting*;
 - 5) Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan;
 - 6) Jumlah desa/kelurahan bebas *Stunting*;
 - 7) Persentase pemerintah daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - 8) Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*.
 - b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa.
 - 1) Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan *Stunting*;
 - 2) Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi;
 - 3) Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. **Pilar 2** : Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
- a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan indikator:
 - 1) Terlaksananya kampanye nasional pencegahan *Stunting*;
 - 2) Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
 - 3) Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 4) Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
 - b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*
 - 1) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 2) Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* sebagai hasil Pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota;
 - 3) Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
 - 4) Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu;
 - 5) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - 6) Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi;

- 7) Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.
- c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*.
 - 1) Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan *Stunting* lintas agama;
 - 2) Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *Stunting*.
3. **Pilar 3** : Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa
 - a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.
 - 1) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah);
 - 2) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
 - 3) Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa);

- 4) Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan *Stunting*;
 - 5) Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 6) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - 7) Persentase calon pengantin calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
 - 8) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi;
 - 9) Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 - 10) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - 11) Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
 - 12) Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - 13) Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
 - 14) Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - 15) Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan *Stunting*.
- a. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.
- 1) Cakupan pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - 2) Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;

- 3) Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);
 - 4) Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - 5) Persentase kabupaten/kota dengan *Age Specific Fertility Rate*/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000;
 - 6) Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan;
 - 7) Persentase *unmet need* pelayanan keluarga berencana.
4. **Pilar 4** : Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
- a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.
 - 1) Persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi;
 - 2) Persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
 - 3) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein, hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI);
 - 4) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 - 5) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai;
 - 6) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;
 - b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan

- 1) Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.
5. **Pilar 5** : Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi
- a. Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *Stunting*.
 - 1) Persentase pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
 - 2) Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
 - 3) Publikasi data *Stunting* tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi strategi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
 - 5) Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di pemerintah daerah provinsi;
 - 6) Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 7) Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di pemerintah desa;
 - 8) Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) *Stunting*.
 - b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.
 - 1) Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung percepatan penurunan *Stunting* secara terintegrasi;
 - 2) Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - 3) Tersedianya data keluarga risiko *Stunting* yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
 - 4) Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah;

- 5) Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan *Stunting*.
- c. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
 - 1) Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tri Dharma perguruan tinggi.
- d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.
 - 1) Tersusunnya platform berbagi pengetahuan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - 2) Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam percepatan penurunan *Stunting*;
 - 3) Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi;
 - 4) Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan penurunan *Stunting*.

Kerangka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* setidaknya menggunakan tiga pendekatan, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan *Stunting* secara signifikan. Tiga pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko *Stunting*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan melalui berbagai kegiatan tahunan.. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu **Misi ke-1: “Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan”** dan **Misi ke-3: “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif”**.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan Kedua Misi di atas antara lain:

1. Terwujudnya birokrasi dan tata kelola Pemerintah yang lebih baik.
2. Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran Renja Perangkat Daerah adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu suatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai sebagai instrumen untuk mencapai tujuan, antara lain:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah
2. Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound/Timely*). Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih cepat, tepat, jelas dan tegas serta akuntabilitas pada publik. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound/Timely*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Meningkatnya kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan yang berkualitas dan kredibel.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
3. Penggerakan dan Pelayanan KB.
4. Melaksanakan Pencegahan dan penanganan *stunting* melalui Peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita.
5. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan

kinerja organisasi. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebanyak 9 (sembilan) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 82 (delapan puluh dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG.
 - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 3) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD..
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan..
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pengadaan Mebel.
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Program Pengendalian Penduduk
- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK).
 - 2) Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
 - 3) Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan.
 - 4) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan.
 - 5) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga.
 - 6) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan.
 - 2) Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
 - 3) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
 - 4) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- 1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - 2) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK.
 - 3) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
 - 4) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
 - 5) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
 - 6) Pengendalian Program KKBPK.
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - 2) Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - 3) Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - 4) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - 5) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - 6) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 - 7) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
 - 8) Peningkatan Kesertaan KB Pria.
- c. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 1) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.

9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
 - 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - 3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - 4) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK.
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

Rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 diuraikan ke dalam Tabel T-C.33 berikut.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Nias Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Kab. Nias Selatan	70%	27.000.000	DAU
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		85%		
						Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif		70,7%		
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dirumuskan	Kab. Nias Selatan	4 Dokumen	19.000.000	DAU
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	2 Dokumen	4.000.000	DAU
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	14 Perangkat Daerah	15.000.000	DAU
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Perangkat Daerah	-	DAU

2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	2 Dokumen	4.000.000	DAU
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	2 Dokumen	4.000.000	DAU
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	2 Dokumen	4.000.000	DAU
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Nias Selatan	2 Dokumen	4.000.000	DAU
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	Kab. Nias Selatan	1,67 Kasus per 100.000	99.000.000	DAU
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	3 Dokumen	29.000.000	DAU
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	2 Dokumen	4.000.000	DAU
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	14 Perangkat Daerah	25.000.000	DAU
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	10 Layanan	40.000.000	DAU

2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab. Nias Selatan	10 Orang	10.000.000	DAU
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	10 Layanan	30.000.000	DAU
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	4 Dokumen	30.000.000	DAU
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	2 Dokumen	10.000.000	DAU
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Kab. Nias Selatan	10 Orang	10.000.000	DAU
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	10.000.000	DAU
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan	57,00 Poin	70.000.000	DAU
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	3 Laporan	45.000.000	DAU
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	14 Perangkat Daerah	20.000.000	DAU

2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	15.000.000	DAU
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	10.000.000	DAU
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	10.000.000	DAU
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Nias Selatan	1 Lembaga	10.000.000	DAU
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab. Nias Selatan	5 Layanan	15.000.000	DAU
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Nias Selatan	5 Layanan	15.000.000	DAU
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kab. Nias Selatan	100%	10.000.000	DAU
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Nias Selatan	2 Dokumen	10.000.000	DAU
2	08	05	201	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	5.000.000	DAU

2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	5.000.000	DAU
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kampung layak anak	Kab. Nias Selatan	100%	125.000.000	DAU
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	2 Dokumen	45.000.000	DAU
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Nias Selatan	10 Organisasi	15.000.000	DAU
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	30.000.000	DAU
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	3 Dokumen	80.000.000	DAU
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	5 Orang	20.000.000	DAU
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	30.000.000	DAU
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	30.000.000	DAU
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Kab. Nias Selatan	100%	10.706.716.089	DAU & DAK

2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kab. Nias Selatan	11 Dokumen	60.000.000	DAU
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	8.500.000	DAU
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	8.500.000	DAU
2	14	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	8.500.000	DAU
2	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	8.500.000	DAU
2	14	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	8.500.000	DAU
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	8.500.000	DAU
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	5 Laporan	9.000.000	DAU
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	Kab. Nias Selatan	20 Dokumen	4.612.766.089	DAU
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nias Selatan	66 Orang/Bulan	4.590.266.089	DAU
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	7.500.000	DAU

2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Nias Selatan	4	Laporan	7.500.000	DAU
2	14	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan	1	Dokumen	7.500.000	DAU
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dikelola Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	1	Laporan	10.000.000	DAU
2	14	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Nias Selatan	1	Laporan	10.000.000	DAU
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	15	Orang	67.500.000	DAU
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Nias Selatan	-	Paket	-	DAU
2	14	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Nias Selatan	15	Orang	67.500.000	DAU
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	100%		680.600.000	DAU
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	1	Paket	12.100.000	DAU
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	150	Paket	126.000.000	DAU
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	150	Paket	12.500.000	DAU
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	1	Paket	25.000.000	DAU
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	1	Paket	35.000.000	DAU
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan	150	Laporan	470.000.000	DAU

2	14	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Nias Selatan	- Dokumen	-	-
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Nias Selatan	15 Unit	4.547.350.000	DAK & DAU
2	14	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	1 Unit	450.000.000	DAU
2	14	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	- Unit	-	-
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	9 Unit	55.000.000	DAK
2	14	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	4 Unit	4.022.350.000	DAK
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	1 Unit	20.000.000	DAU
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	100%	148.500.000	DAU
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan	350 Laporan	3.500.000	DAU
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	12 Laporan	15.000.000	DAU
2	14	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	12 Laporan	15.000.000	DAU
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	8 Laporan	115.000.000	DAU
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Nias Selatan	77 Unit	580.000.000	DAU

2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Nias Selatan	1 Unit	20.000.000	DAU
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Nias Selatan	25 Unit	50.000.000	DAU
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Nias Selatan	25 Unit	50.000.000	DAU
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam	1 Unit	360.000.000	DAU
2	14	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Nias Selatan	25 Unit	100.000.000	DAU
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Kab. Nias Selatan	20% 87%	355.000.000	DAU
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen hasil Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Nias Selatan	6 Dokumen	210.000.000	DAU
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	20.000.000	DAU
2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	20.000.000	DAU
2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	20.000.000	DAU

2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Nias Selatan	10 Organisasi	50.000.000	DAU
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	50.000.000	DAU
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	50.000.000	DAU
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	6 Dokumen	145.000.000	DAU
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	15.000.000	DAU
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	15.000.000	DAU
2	14	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini)		Kab. Nias Selatan	-	-	-
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Kab. Nias Selatan	5 Unit	100.000.000	DAU
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	15.000.000	DAU
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kampung KB Aktif Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	100% 100%	1.960.000.000	DAK

2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	100%	700.000.000	DAK
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	10.000.000	DAK
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Nias Selatan	23 Unit	180.000.000	DAK
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	10.000.000	DAK
2	14	03	2.01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK		Kab. Nias Selatan	-	-	-
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Nias Selatan	78 Laporan	250.000.000	DAK
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Nias Selatan	23 Laporan	100.000.000	DAK
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	35 Laporan	150.000.000	DAK

2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan	Kab. Nias Selatan	35 Orang	160.000.000	DAK
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Nias Selatan	35 Organisasi	140.000.000	DAK
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Kab. Nias Selatan	- Unit	-	-
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	20.000.000	DAK
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan	Kab. Nias Selatan	100%	460.000.000	DAK
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	47 Laporan	40.000.000	DAK
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	15 Orang	20.000.000	DAK
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Nias Selatan	- Orang	-	-
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	47 Dokumen	60.000.000	DAK
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	5 Unit	40.000.000	DAK

2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	41	Laporan	40.000.000	DAK
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Nias Selatan	5	Orang	20.000.000	DAK
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Nias Selatan	4	Laporan	200.000.000	DAK
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Kab. Nias Selatan	10	Orang	40.000.000	DAK
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Nias Selatan	78	Kampung KB	640.000.000	DAK
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan	78	Dokumen	640.000.000	DAK
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR-PIKR) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif	Kab. Nias Selatan	60% 70% 60%		2.320.649.911	DAK
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nias Selatan	100%		2.290.649.911	DAK

2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kab. Nias Selatan	78 Kelompok	1.155.000.000	DAK
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	20 Unit	100.000.000	DAK
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	461 Orang	1.025.649.911	DAK
2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	10.000.000	DAK
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	30.000.000	DAK
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	30.000.000	DAK
TOTAL PAGU INDIKATIF TAHUN 2024 (Rp)									15.673.366.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, secara rinci tercantum pada Tabel 4.1 (terlampir).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebanyak 9 program 28 kegiatan dengan nilai total pagu anggaran sebesar Rp. 15.653.366.000 dengan diprioritaskan kepada pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kualitas/kompetensi Sumber Daya Manusia, peningkatan kualitas hidup, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, peningkatan kualitas pelayanan KB serta percepatan penurunan stunting.

Agar pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 memenuhi harapan sebagaimana imbalan antara rancangan awal dan analisis kebutuhan, perlu disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 diturunkan dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 sebagai manifestasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.
2. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 menjadi bahan bagi stakeholder bidang perencanaan pembangunan untuk dapat dikritisi, dievaluasi dan disempurnakan dalam Forum DKT (Diskusi Kelompok Terbatas) antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dengan stakeholder bidang perencanaan pembangunan.

3. Skala prioritas terhadap rasionalisasi anggaran ataupun program/kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, dan selalu dikembalikan pada upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan pusat ataupun pemerintahan provinsi, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sekaligus mencapai Visi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam kurun waktu 2021-2026 "**Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera**".

Teluk Dalam, 31 Juli 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan,



SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M
Pembina
NIP. 19810810 200112 2 001

LAMPIRAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						15.653.366.000,00							19.000.011.089,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.653.366.000,00							19.000.011.089,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						331.000.000,00							331.000.000,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	72.70 Persen 2 Dokumen 85.00 Persen 2 Kegiatan 80.00 Persen			70.00 Persen 70.70 Persen 85.00 Persen	27.000.000,00						72.70 Persen 2 Dokumen 85.00 Persen 2 Kegiatan 80.00 Persen	27.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	-			2 Kegiatan 2 Dokumen	19.000.000,00			-	-	-	-	19.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	4.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Perangkat Daerah	15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	-			2 Dokumen	4.000.000,00			-	-	-	-	4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	4.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			2 Dokumen	4.000.000,00			-	-	-	-	4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				2 Dokumen	4.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)</i>	2.11 Kasus per 100.000			1.67 Kasus per 100.000	99.000.000,00						2.11 Kasus per 100.000	99.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			1 Kegiatan 2 Dokumen	29.000.000,00			-	-	-	-	29.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	4.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				14 Perangkat Daerah	25.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			10 Orang 10 Orang	40.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				10 Orang	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Layanan	30.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-			2 Laporan 1 Dokumen 10 Orang	30.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				10 Orang	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pembangunan Keluarga	57.00 Poin			57.00 Poin	70.000.000,00						57.00 Poin	70.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-			14 Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Laporan	45.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Perangkat Daerah	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Lembaga	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			5 Kali	15.000.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Layanan	15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	100.00 Persen			100 Persen	10.000.000,00						100.00 Persen	10.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen 1 Dokumen	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Persentase kampung layak anak</i>	100.00 Pers en			100 Persen	125.000.000,00						100.00 Pers en	125.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			10 Orang 1 Dokumen	45.000.000,00			-	-	-	-	45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</i>				10 Organisasi	15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			1 Dokumen 1 Dokumen 5 Orang	80.000.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	8.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Fasilitasi penyediaan Lapangan pekerjaan	-		7.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	8.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	9.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Penyedíaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-			4 Dokumen 4 Dokumen 14 Bulan 1 Dokumen	4.612.766.089,00			-	-	-	-	4.612.766.089,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				66 Orang/bulan	4.590.266.089,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.590.266.089,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	7.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	7.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	7.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Koordinasi dan penilaian barang milik daerah</i>	-			1 Dokumen	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	-			45 Stell 15 Orang	67.500.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				15 Orang	67.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	-			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Buah 150 Buah 150 Buah 150 Kali	680.600.000,00			-	-	-	-	1.152.195.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	12.100.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.310.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				150 Paket	126.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				150 Paket	12.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		332.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Fasilitasi penyediaan Lapangan pekerjaan	-		113.135.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	470.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			4 Unit 14 Unit	4.547.350.000,00			-	-	-	-	2.580.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	450.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	-	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	55.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN STUNTING (KB)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4.022.350.000,00	Kab. Nias Selatan, Umbunasi, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Simuk, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Utara, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-KB	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Bulan 8 Orang/Bulan 12 Bulan 350 Buah	148.500.000,00			-	-	-	-	148.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	3.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	115.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			25 Unit 1 Unit 25 Unit	580.000.000,00			-	-	-	-	2.600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	360.000.000,00	Kab. Nias Selatan, Teluk Dalam, Pasar Teluk Dalam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	85.00 Perse n 24.00 Perse n			20 Persen 87 Persen	335.000.000,00						85.00 Perse n 24.00 Perse n	335.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-			1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan	190.000.000,00			-	-	-	-	190.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan														
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				1 Dokumen	20.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				10 Organisasi	50.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	50.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	20.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	50.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-			5 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	145.000.000,00			-	-	-	-	145.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	15.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	15.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				23 Unit	180.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-KB	-	-	-		230.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				23 Laporan	100.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				78 Laporan	250.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		390.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	10.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	10.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-			35 Kecamatan 1 Kegiatan	160.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n	-	-	485.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				0 Unit	0,00	-	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat	-		280.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				35 Organisasi	140.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat	-		175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	20.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-			4 Kegiatan 41 Faskes 47 Faskes 10 Orang 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 Faskes	460.000.000,00			-	-	-	-	842.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				47 Laporan	40.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KEFARMASIAN	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				47 Dokumen	60.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		82.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				5 Unit	40.000.000,00	-	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya				41 Laporan	40.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				5 Orang	20.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				4 Laporan	200.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria														
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				10 Orang	40.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				15 Orang	20.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-			78 Kampung KB	640.000.000,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n	-	-	1.328.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				78 Dokumen	640.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n	-		1.328.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<i>Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR-PIKR) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif</i>	80.00 Perse n 80.00 Perse n 80.00 Perse n			60 Persen 70 Persen 60 Persen	2.320.649.911,00						80.00 Perse n 80.00 Perse n 70.00 Perse n	3.507.800.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK</i>	-			78 Kampung KB 20 Paket 461 Desa 1 Dokumen	2.290.649.911,00			-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n	-	-	3.477.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>				20 Unit	100.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kem asyarakata n	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				461 Orang	1.025.649.911,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		2.212.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)															
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				78 Kelompok	1.155.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	-		1.155.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	-			1 Kegiatan	30.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja															
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	30.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	JUMLAH							15.653.366.000,00							19.000.011.089,00		